

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta interpretasi yang sudah dijalankan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu seperti berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Sumatera. Dibuktikan dengan sebagian besar daerah menunjukkan hasil yang signifikan dengan P Value $< 0,15$. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD, semakin besar alokasi belanja modal yang dialokasikan. Sebaliknya, DBHP dan DBHBP tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dimana, hasil analisis dari pengaruh keduanya (DBHP dan DBHBP) terhadap Belanja Modal yang menunjukkan P Value $> 0,15$. Artinya, hubungan antara DBHP dan BM tidak signifikan begitu juga hubungan DBHBP dengan BM. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada sumber pendanaan lain atau pengelolaan anggaran yang kurang efektif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan PAD yang efektif dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendongkrak belanja modal. Sementara DBHP dan DBHBP perlu dioptimalkan secara strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan memaksimalkan potensi pendanaan yang ada.
2. Berdasarkan hasil analisis, Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Sumatera. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dan alokasi BM yang tidak efektif dalam mendukung sektor-sektor produktif. Selain itu, ketidakefektifan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran juga membuat BM tidak cukup berdampak terhadap PDRB. Sementara itu, PAD berpengaruh positif terhadap PDRB, meskipun kontribusinya masih terbatas, sedangkan DBHP dan DBHBP tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDRB secara langsung. Melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening, DBHP memiliki dampak yang lebih besar terhadap PDRB dibandingkan PAD dan DBHBP. Oleh karena

itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memfokuskan pengalokasian DBHP dan DBHBP pada proyek-proyek produktif yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Berdasarkan hasil uji Sobel yang dilakukan terhadap seluruh provinsi di Pulau Sumatera dengan tiga jalur analisis yaitu $PAD \rightarrow BM \rightarrow PDRB$, $DBHP \rightarrow BM \rightarrow PDRB$, dan $DBHBP \rightarrow BM \rightarrow PDRB$, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari PAD, DBHP, maupun DBHBP terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun variabel-variabel tersebut mempengaruhi belanja modal secara langsung, mereka tidak berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam proses pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan pemaparan hasil analisa dan kesimpulan yang telah di berikan, maka berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak, transparansi retribusi, dan perluasan basis pajak. Selain itu, perlu ada regulasi yang memastikan alokasi PAD lebih difokuskan pada belanja modal daripada belanja operasional untuk meningkatkan pembangunan daerah.
2. Strategi pengelolaan DBHP harus lebih optimal agar berkontribusi pada belanja modal. Langkah yang perlu dilakukan meliputi diversifikasi sumber pendapatan, reformasi kebijakan fiskal, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah secara efektif.
3. DBHBP perlu dikelola dengan lebih efisien melalui optimalisasi alokasi anggaran, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi kebijakan fiskal serta dorongan investasi infrastruktur menjadi langkah penting agar DBHBP lebih berkontribusi terhadap belanja modal di daerah.

4. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, mendukung sektor ekonomi unggulan, dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat juga diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Agar DBHP lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi dana untuk belanja modal, memperkuat kapasitas fiskal, serta memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana, pengembangan sektor unggulan juga harus menjadi prioritas dalam setiap daerah.
6. DBHP perlu dikelola dengan kebijakan yang lebih strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti mengalokasikan dana untuk infrastruktur dan sektor produktif, melakukan diversifikasi sumber pendapatan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi kebijakan distribusi DBHP juga perlu dilakukan untuk hasil yang lebih optimal.
7. Perencanaan dan alokasi belanja modal harus lebih fokus pada sektor produktif yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi kemitraan dengan sektor swasta, serta reformasi tata kelola anggaran menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat belanja modal bagi daerah.